

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **A. Pengertian Efektivitas Hukum**

Efektifitas merupakan suatu kata yang apabila diterjemahkan dalam bahasa Indonesia berdefinisi dari bahasa Inggris yang berbunyi dapat ditaati, manjur, sakti dan menggumkan. beberapa definisi tersebut, sehingga definisi yang paling cocok ialah dapat ditaati. Efektifitas bisa disimpulkan oleh Amin Tunggal Widjaya<sup>1</sup> yakni mematahkan suatu ketentuan dimana ketentuan itu mengarah pada perilaku atau tindakan yang benar, yang bisa menggapai suatu tujuan yang diinginkan. Sedangkan pendapat Permata Wesh<sup>2</sup> efektifitas ialah kemampuan dan kondisi tercapainya suatu tindakan yang dilakukan oleh manusia agar dapat memberi guna yang diinginkan. Untuk dapat melihat efektifitas umum digunakan empat jenis pertimbangan, yaitu: pertimbangan ekonomi, fisiologi, psikologi dan pertimbangan sosial. Efektivitas dapat diringkas sebagai negara yang keberadaan diinginkan kemenangan. Mengingat efektifitas makna Sarwoto efektif adalah fasilitas untuk penglihatan yang baik dan misi yang sesuai dengan kebutuhan dan tujuan.

Menurut terjemahan Cambel J. P, efektifitas dapat diukur secara umum dengan apa yang dominan:

1. Kepuasan dengan program

---

<sup>1</sup> Landasan Teori, Pengertian Efektivitas Kerja adalah Menurut Definisi Para Ahli, dalam <http://www.landasanteorikomaksses> 08 Maret 2018

<sup>2</sup> Ibid

2. keberhasilan tepat tujuan

3. Keberhasilan program

Jadi efektivitas program dapat dijalankan dengan potensi operasi untuk melaksanakan desain sesuai dengan pekerjaan desain telah direncanakan sebelumnya. efektivitas bahwasannya Dari uraian di atas, dapat digambarkan potensi untuk melakukan kegiatan fisik atau fisik untuk mencapai tujuan.

Efektivitas hukum sesuai dengan ide Soerjono Soekanto efektif atau tidak efektif sebagai hukum yang berlaku ditentukan oleh beberapa faktor, antara lain:

1. Faktor penegak hukum hukum
2. Faktor itu sendiri (Hukum)
3. Faktor sarana atau alat-alat yang mendukung penegakan hukum
4. Faktor budaya masyarakat
5. Faktor

Faktor-faktor yang berkaitan erat, sehingga merupakan esensi dari aturan hukum, dan juga dapat mengukur efektivitas penegakan hukum dalam faktor-faktor bahwasannya tersebut dapat menentukan fungsi dari hukum tertulis dipatuhi atau tidak dipatuhi tergantung bagaimana Anda dapat menegakkan hukum. Menurut efektivitas Soerjono Soekanto itu adalah elemen pertama:

1. ada undang-undang mengenai daerah-daerah tertentu dari kehidupan cukup sinkron, horizontal dan hirarki tidak ada kontradiksi.
2. ada undang-undang mengenai daerah-daerah tertentu dari kehidupan cukup sistematis.

3. Penerbitan peraturan khusus yang konsisten dengan persyaratan hukum yang ada.

peraturan kuantitatif dan kualitatif yang mengatur bidang-bidang tertentu dan mencukupi. Selanjutnya aparat penegak hukum sangat berpengaruh sebagai hukum instrumen yang efektif penegak tertulis adalah hukum, dalam hal ini penerapan hukum ingin keyakinannya bahwa penegak hukum dapat melaksanakan fungsi mereka sebaik mungkin. penegak hukum untuk melakukan tugasnya dengan baik, maka dalam hal memiliki keterampilan mental dan profesional yang baik.

Pendapat Soerjono Soekanto<sup>3</sup> sangat mempengaruhi efektivitas hukum tertulis dapat dilihat oleh penegak hukum akan tergantung pada berikut:

1. Sampai batas mana penegak hukum sejauh untuk memberikan kebijaksanaan.
2. Sejauh mana penegak hukum tunduk pada peraturan yang ada.
3. Sampai sejauh mana tingkat sinkronisasi tugas yang diberikan kepada petugas untuk memberikan margin tajam pada kewenangannya.
4. kebijakan macam apa yang harus diberikan kepada publik.

Dalam elemen ketiga, ketersediaan sarana dan prasarana untuk pelaksanaannya dalam melakukan tugasnya. Sarana dan prasarana yang dimaksud adalah infrastruktur atau fasilitas yang digunakan sebagai alat untuk mencapai efektivitas hukum. Terkait dengan infrastruktur dan alat-alat yang dapat dikatakan dengan makna fasilitas ini, menurut pendapat Soekanto sesuai dengan efisiensi indeks acuan yakni memberikan infrastruktur menjadi jelas

---

<sup>3</sup> Soerjono Soekanto, loc.cit

agar berkontribusi untuk kelancaran aparat tugas di tempat atau lokasi. Berikut faktor-faktor seperti mengukur efektivitas tergantung pada keadaan masyarakat:

1. Faktor pemicu masyarakat tidak mengikuti aturan meskipun aturan yang sangat baik dan jelas.
2. Faktor pemicu masyarakat tidak mematuhi aturan meskipun aturan yang baik.
3. Faktor-faktor yang membuat masyarakat yang tidak memenuhi petugas dan aparat dan fasilitas yang memadai.

Menurut pendapat hukum efektifitas terkait teori Soerjono Soekanto<sup>4</sup> menurut teori disajikan oleh faktor Romli Atmasasmita<sup>5</sup> yang dapat memperlambat efektivitas penegakan yang tidak hanya dalam sikap mental penegak hukum (jaksa, pembela umum, hakim dan polisi), tetapi juga merupakan faktor sosialisasi hukum yang kadang-kadang diabaikan. Berbicara tentang efektivitas hukum secara tidak langsung juga berbicara pada operasi undang-undang tentang regulasi dan penegakan opini publik untuk penegakan hukum yang lebih baik. hukum dapat efektif jika faktor yang mempengaruhi hukum dapat bekerja sebaik mungkin. Ukuran atau tidak adanya undang-undang yang efektif berlaku dapat dilihat dari perilaku masyarakat. Sebuah undang-undang atau hukum akan efektif jika warga berperilaku seperti yang diharapkan atau diwajibkan oleh hukum atau

---

<sup>4</sup> Ibid

<sup>5</sup> Romli Atmasasmita. Reformasi Hukum, Hak Asasi Manusia & Penegakan Hukum, Bandung, Mandar Maju. 2001. Hal. 55

peraturan telah mencapai tujuan yang diinginkan, maka efektivitas undang-undang atau peraturan telah dicapai.

## **B. Perlindungan Hukum terhadap Anak**

Menurut Fitzgerald, teori Salmond tujuan perlindungan hukum bertujuan untuk mengintegrasikan dan mengkoordinasikan berbagai kepentingan masyarakat sebagai lalu lintas, kepentingan, perlindungan kepentingan tertentu dapat dilakukan dengan membatasi beragam kepentingan di sisi lain . kepentingan hukum berkaitan dengan hak dan kepentingan manusia, sehingga hukum memiliki otoritas tertinggi untuk menentukan manfaat dari orang yang perlu diatur dan dilindungi. Menurut Satjipto, perlindungan hukum adalah untuk hak perlindungan manusia (HAM) yang dirugikan orang lain agar dapat mendapatkan perlindungan dan hak-haknya sehingga orang tersebut dapat menikmati semua hak yang diberikan oleh hukum. Menurut Pjillipus M. Hadjon bahwa perlindungan hukum bagi masyarakat dengan pencegahan dan responsif dari langkah-langkah pemerintah.

Dengan tujuan perlindungan hukum preventif untuk mencegah perselisihan, mengarahkan tindakan pemerintah untuk berhati-hati dalam membuat keputusan didasarkan pada kebijakan dan perlindungan responsif tujuan untuk sengketa menghindari, termasuk mengelola lembaga peradilan . Hampir setiap orang memiliki hak untuk perlindungan hukum. Hampir semua hubungan hukum harus dilindungi oleh hukum. Jadi terdapat banyak tipe perlindungan hukum. sehingga perlindungan hukum tidak menampilkan pola yang jelas dalam hukum pidana positif yang berlaku dikala ini merupakan perlindungan" abstrak" ataupun" proteksi tidak langsung". Ini berarti kalau

undang- undang sebagian perumusan kejahatan sudah berlaku tidak mempunyai perlindungan secara abstrak langsung terhadap kepentingan hukum serta hak- hak korban Perlindungan secara tidak langsung dalam regulasi hukum positif belum sanggup membagikan proteksi yang optimal, sebab realitas di Indonesia menampilkan hukum yang berlaku tentu tidak sanggup menjamin kepastian hukum serta rasa keadilan. Perlindungan korban kejahatan perkosaan tidak bisa dipisahkan dari konsekuensi yang dialami oleh korban sehabis pemerkosaan itu. Ada pula rasa sakit yang dialami oleh korban bagaikan akibat perkosaan bisa dibedakan:

1. Akibat fisik
2. Akibat Mental
3. Akibat kehidupan individu serta sosial

Upaya dalam melindungi kanak- kanak terhadap kejahatan perkosaan yang tercantum dalam Undang- Undang No 23 Tahun 2002 tentang proteksi anak yang bisa diringkas bagaikan berikut:

- a. Melarang aksi ikatan intim dengan seseorang anak dengan kekerasan ataupun ancaman kekerasan dalam Pasal 81 ayat( 1).
- b. Melarang aksi ikatan intim dengan seseorang anak dengan metode apapun, misalnya dengan metode kekerasan, ancaman kekerasan serta palsu dengan iktikad supaya anak bisa cabul bersumber pada Pasal 82
- c. Melarang aksi ikatan intim dengan seseorang anak dengan metode apapun misalnya buat meyakinkan, menggoda, menipu serta godaan kanak- kanak atas undangan laporan bersumber pada Pasal 81 ayat( 2).

d. Melarang ataupun perdagangan kanak- kanak ataupun mengeksploitasi kanak- kanak buat keuntungan orang lain ataupun diatur dalam Pasal 88.

Bagi UU Nomor 23 tahun 2002 tentang Proteksi Anak Pasal 64 ayat( 3), yang berisi paling utama pada upaya segaala oleh pemerintah buat perlindungan kanak- kanak yang jadi korban kejahatan meliputi:

- a. upaya rehabilitasi, baik di dalam lembaga serta luar lembaga;
- b. upaya perlindungan bukti diri oleh media massa serta menjauhi pelabelan;
- c. Membagikan jaminan keselamatan korban serta saksi, saksi pakar, baik itu raga, mental serta sosial. Sediakan akses ke data tentang pertumbuhan permasalahannya.
- d. Upaya buat perlindungan kanak- kanak wajib terus diupayakan demi melindungi kesejahteraan kanak- kanak, dengan memikirkan kanak- kanak merupakan peninggalan berharga untuk kemajuan bangsa di masa depan. Mutu perlindungan anak wajib mempunyai derajat yang sama ataupun tingkatan proteksi terhadap orang berusia orang tua, sebab tiap orang mempunyai posisi yang sama di hadapan hukum. Oleh sebab itu, negeri bersama- sama dengan segenap warga silih bekerja sama dalam membagikan perlindungan kepada kanak- kanak dari bermacam wujud kekerasan yang dicoba oleh orang- orang yang tidak bertanggungjawab yang mamfaatkan kanak- kanak bagaikan tempat kejahatannya.

### **C. Definisi anak dalam hukum**

Berdasarkan Kamus Umum Bahasa Indonesia membahas makna etimologis anak didefinisikan sebagai usia manusia masih sangat kecil dan

belum dewasa. Menurut terjemahan R.A Kosnan<sup>6</sup> "Anak-anak adalah manusia yang memiliki usia paling awal dari manusia dewasa, anak-anak dihidupnya telah sangat mudah dipengaruhi pikiran dengan hal-hal di sekelilingnya." oleh karena itu anak-anak harus ditanggapi dengan serius. Namun, sebagai makhluk sosial yang paling rentan dan lemah, ironisnya anak-anak sering ditempatkan pada posisi yang paling dirugikan, tidak memiliki hak untuk berbicara, dan terutama anak-anak juga sering menjadi korban pelecehan dan kekerasan terhadap hak-haknya. Indonesia memiliki pemahaman anak terhadap hukum, dan menurut para ahli. Tapi di antara beberapa pengertian bahwa ada kesamaan mengenai definisi anak, karena dalam bagian bawah belakang maksud dan tujuan masing-masing hukum atau ahli. Definisi anak di bawah undang-undang dapat dianggap sebagai berikut:

1. Anak-anak di bawah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak Definisi anak di bawah pasal 1, ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak adalah seseorang yang berada di bawah 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang belum lahir.
2. Menurut Peradilan Pidana UU anak-anak di pasal 45 KUHP adalah anak yang belum mencapai usia 16 (enam belas) tahun.
3. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang kesejahteraan anak-anak.
4. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang perlindungan anak seharusnya anak adalah orang yang belum mencapai usia 21 (dua puluh satu) tahun dan belum pernah menikah (Pasal 1 , titik 2).

---

<sup>6</sup> R.A. Koesnan, Susunan Pidana dalam Negara Sosialis Indonesia, (Bandung :Sumur, 2005) , hal. 113



#### **D. Definisi korban dalam hukum**

korban (victims) oleh Muladi<sup>7</sup> merupakan orang- orang yang sudah secara individual ataupun kolektif, mengidap sesuatu kerugian, tercantum kehancuran raga ataupun kendala mental, emosional, ekonomi ataupun substansial hak- hak mereka yang fundamental, dengan aksi ataupun komisi yang melanggar hukum pidana di tiap- tiap negeri, tercantum penyalahgunaan kekuasaan. Terpaut dengan kekerasan dalam rumah tangga terhadap anak paling tidak wajib dimengerti bagaikan aspek yang merangsang kekerasan pada kanak- kanak, misalnya, kurang dari kontrol sosial terhadap pelaku kekerasan terhadap anak, apalagi bila pelaku merupakan orang tua ataupun saudara dekat bila ikatan antara anak serta orang tua dikira bagaikan hirarki dalam perihal ini berarti tidak terdapat komunikasi batasan sebab anak dikira sedikit makhluk yang suaranya tidak pedulikan buat orang berusia, perihal terakhir merupakan kemiskinan yang ialah aspek dominan yang dikira pusat permasalahan sehingga anak jadi pusat kemarahan, ketidakpuasan, penuh kesedihan sebab kemiskinan sehingga kekerasan terhadap kanak- kanak sebab mereka tidak dapat melawan.

Dalam uraian UUD 1945 Pasal 34 berkata kalau " anak-anak miskin serta terlantar dipelihara oleh negeri." Ini jadi tren positif dalam upaya Negeri buat menjamin perlindungan lengkap dari hak- hak anak. C. Rover berkata penerapan kejahatan merupakan tujuan mendasar dari penegakan hukum dan merupakan bidang kegiatan dengan nilai spesifik bagi hak-hak anak (termasuk didalamnya perempuan). Namun cara berfikir masyarakat yang

---

<sup>7</sup> Muladi, 2005, HAM Dalam Perspektif Sistem Peradilan Pidana, Refika Aditama, Bandung, hal. 108

menganggap kekerasan dalam rumah tangga bukan sebagai tindak pidana yang melanggar kaidah hukum namun lebih merupakan masalah keluarga ataupun masalah perempuan saja membuat hal ini menjadi sepele di mata aparat hukum.

Peran penerapan hukum yang berkaitan dengan anak-anak mengalami masalah dengan hukum dilaksanakan dalam Undang- Undang No 23 tahun 2002 bisa disimpulkan:

1. Perlindungan spesial untuk anak yang berhadapan dengan hukum merupakan tugas serta tanggung jawab pemerintah serta warga.
2. Perawatan anak-anak secara manusiawi cocok dengan martabat serta hak-hak anak.
3. Penyediaan petugas spesial semenjak dini
4. Penyediaan fasilitas serta sarana khusus
5. Pengenaan sanksi yang pas buat kepentingan yang terbaik,
6. Pemantauan serta pencatatan terus menerus pada pengembangan anak yang berkonflik dengan hukum
7. Pemberian jaminan buat mempertahankan ikatan dengan orang tua ataupun keluarga mereka,
8. Perlindungan bukti diri lewat pelabelan media kabar serta menjauhi,
9. perlindungan dengan upaya restorasi, baik di dalam lembaga serta luar lembaga,
10. Perlindungan bukti diri lewat media massa serta buat pelabelan menjauhi dan

11. Bagikan jaminan keamanan korban serta saksi, saksi pakar, baik itu raga, mental serta sosial, serta membagikan data tentang pertumbuhan permasalahan ini.

#### **E. Definisi Hukum Kekerasan**

Kekerasan (violence) adalah sesuatu yang menggunakan ancaman kekerasan fisik untuk menyebabkan cedera pada orang lain. Dalam konteks kekerasan, ada teori pembelajaran sosial menjelaskan sesuatu perilaku baru dari anak-anak bahwasannya yang diambil oleh indera penglihatan, dan praktek meniru tindakan nyata. Kekerasan dalam berbagai cara sebagai budaya untuk melakukan sebagaimana perlaku, yang hingga saat ini adalah sesuatu struktur yang tidak biasa yang mengurangi nilai kepribadian bangsa Indonesia dan memberikan kesan tentang bagaimana kondisi kepribadian itu tidak sepenuhnya mampu memiliki mengintrospeksi kepribadian politik, ekonomi dan sosial kepribadian bangsa,

Kekerasan telah menjadi akrab dalam kehidupan sehari-hari. Penyelesaian permasalahan selalu disertai dengan kekerasan yang sering terjadi kekerasan. Tindakan tidak hanya dibuat oleh satu orang, tetapi sebagai anggota bangsa, dan pejabat negeri. Johan Galtung tipologi kekerasan dipecah jadi 3, ialah kekerasan langsung, kekerasan budaya serta kekerasan struktural. Kekerasan langsung merupakan sesuatu kejadian( event); kekerasan struktural merupakan sesuatu proses; sebaliknya penyalahgunaan budaya merupakan suatu yang permanen. Tipe ketiga kekerasan dalam periode yang berbeda, yang analog dengan perbandingan teori gempa antara gempa bagaikan sesuatu kejadian( kekerasan langsung), gerakan lempeng tektonik bagaikan

proses( kekerasan struktural), serta garis- garis retak bagaikan keadaan permanen( kekerasan budaya).

Kondisi ini mengarah pada visi tingkat fenomenologi kekerasan dengan kekerasan. kekerasan budaya adalah pada tingkat terendah dan merupakan sumber yang baik dari ide untuk kekerasan struktural dan kekerasan langsung. Tingkat berikutnya irama kekerasan struktural dan motif kekerasan melokal kekerasan budaya. Dan tertinggi, kekerasan dirasakan oleh mata dalam bentuk kekerasan langsung yang dilakukan oleh laki-laki terhadap yang lain. Mengarahkan wujudnya di tindak kekerasan, termasuk pembunuhan, pemukulan, intimidasi atau kekerasan penyiksaan. Kekerasan dilembagakan struktur dasarnya dalam kondisi, struktur dan sistem seperti misalnya diskriminasi dalam pekerjaan, pelayanan pendidikan dan kesehatan. kekerasan budaya merupakan manifestasi dari perasaan, sikap, nilai-nilai yang diamati dalam masyarakat ketakutan, kebencian, intoleransi, rasisme.

Pada dasarnya sifat kekerasan ada dua (2) kekerasan pribadi dan kekerasan struktural. Kekerasan pribadi yang dinamis, mudah diamati, menunjukkan fluktuasi yang besar yang dapat menyebabkan perubahan sedangkan kekerasan( kejahatan yang tersembunyi) diucap demikian, sebab baik pelaku ataupun korban berupaya buat merahasiakan perbuatan tersebut dari pemikiran publik, kadangkala pula diucap domestic violence( kekerasan dalam negeri).

Undang- Undang No 39 Tahun 1999( HAM ditantang berikutnya diucap UU Nomor. 39 Tahun 1999) serta UU Nomor. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak( berikutnya disebut dalam UU No 23 2002) serta yang

terakhir dalam UU Nomor. 23 tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga( berikutnya diucap UU Nomor. 23 tahun 2004). Peraturan Perundang- undangan tentang hak- hak anak, penerapan kewajiban tanggung jawab orang tua, keluarga, warga, pemerintah serta negeri.

Berdialog tentang anak-anak sangat berarti sebab kanak- kanak merupakan nasib kemampuan generasi ataupun bangsa di masa depan. anak-anak bangsa mencerminkan serta memastikan perilaku pembangunan bangsa. Perihal ini pastinya jadi atensi luas untuk seluruh orang buat menempatkan posisi anak bagaikan manusia yang wajib dicermati serta seluruh kebutuhan yang penuhi kebutuhan kanak- kanak mereka sendiri.

Namun perihal ini terjalin begitu banyak anak- anak yang jadi korban kekerasan dalam kehidupan mereka, apalagi bila itu diawali dari area terdekat dengan keluarganya sendiri. Kekerasan intim yang kerap terjalin. Suasana ini diperparah oleh pandangan hidup jaga praja ataupun melindungi pandangan hidup keluarga, paling utama dalam budaya Jawa" membuka aib keluarga sama dengan membuka aib sendiri", suasana demikian bagi Harkristuti Harkrisnowo dalam bermacam peluang menimbulkan tingginya the“ dark number” sebab tidak dilaporkan.

#### **F. Kekerasan dalam Rumah tangga terhadap anak**

kekerasan dalam rumah tangga terhadap anak masih berlangsung. Tiap hari, ratusan ribu ataupun apalagi jutaan kanak- kanak Indonesia buat hidup di terik matahari, malam dikedindingan ataupun di tempat- tempat beresiko, terdapat kanak- kanak yang disiksa orang tua ataupun orang mereka yang

memelihara. Tetapi apa yang diartikan dengan kekerasan terhadap anak, diungkapkan oleh sebagian pakar bagaikan berikut:

1. James Vander Zanden dalam bukunya Human Development( 1989) definisi penganiayaan( abuse/ penyiksaan) bagaikan serbuan raga( bisa menimbulkan luka) serta terbuat terencana oleh orang- orang yang sepatutnya jadi care taker.

2. David A Wolfe dalam penyalahgunaan anak bukunya, berkata kalau kekerasan terhadap anak bisa mengambil wujud kekerasan raga, pelecehan emosional, pelecehan intim serta penelantaran( kelalaian). Bisa dimaksud bagaikan meninggalkan minimnya atensi sosial, emosional serta raga yang pas, yang benar diterima oleh anak. Psikiater yang berjumpa di Asosiasi Komunitas penangkalan kekerasan di antara kanak- kanak di Inggris( 1999) berkomentar kalau membesarkan anak merupakan posisi penyiksaan melainkan pasif.

Dampak dari kekerasan serta penelantaran anak- anak dan melaksanakan konsekuensi kurang baik. Mengabaikan anak itu terkategori penyiksaan sebab kelalaian, anak- anak tidak memperoleh hak- hak mereka, apakah hak buat dicintai, buat hidup, berkembang, buat memperoleh pembelajaran serta sekolah, keselamatan, kesehatan, perlindungan, mempunyai masa depan. Membiarkan ataupun mendesak anak- anak buat konsumsi alkohol, obat- obatan( narkoba), rokok serta apapun yang beresiko buat kesehatan anak diklasifikasikan bagaikan pelepasan aksi. Kita tidak dapat menyepelekan akibat kelalaian tentang Kekerasan menyamakan sebab keduanya mempunyai kemampuan buat mengganggu serta membahayakan

kelangsungan hidup anak. Pula dalam undang- undang disebutkan kalau yang diartikan dengan kekerasan merupakan aksi melawan salah satu kemiskinan ataupun raga, intim, psikologis, ataupun penelantaran rumah tangga tercantum ancaman buat melaksanakan sesuatu aksi ilegal memforsir kebebasan dalam lingkup dalam negeri. Walaupun lingkup rumah tangga dalam hukum ini merupakan:

- a. Suami, istri serta anak- anak.
- b. Orang- orang yang mempunyai ikatan keluarga dengan orang yang diartikan dalam huruf a karna ikatan darah, pernikahan, persusuan, perawatan serta perwalian, yang tinggal di rumah tangga.
- c. Orang yang bekerja menolong rumah tangga serta menetap dalam rumah tangga tersebut.

Secara universal, bisa disimpulkan kalau kekerasan terhadap anak dalam rumah tangga merupakan kekerasan melanggar hak orang lain, terlepas dari ras, etnis, ataupun kelompok sosial serta tertentu ekonomi, yang apakah raga, intim, psikologis, ekonomi, yang lain masih tertutup dengan metode kekerasan.

#### **G.Lembaga Perlindungan Anak**

Lembaga Perlindungan Anak diberlakukan setelah Komisi Perlindungan Anak (Komnas PA) adalah sebuah organisasi di Indonesia untuk memantau, memantau dan melindungi hak-hak anak, serta mencegah dari kemungkinan pelanggaran hak-hak anak yang dilakukan oleh Negara, individu atau lembaga. Lembaga Perlindungan Anak didirikan sebagai bentuk perlindungan anak terhadap segala bentuk tindakan: kelalaian, diskriminasi,

eksploitasi dan kekerasan itu adalah prinsip-prinsip dan independen, menawarkan tindakan terbaik anak-anak dan untuk melindungi dan menghormati hak-hak anak tidak didapat oleh anak, maka sebagai tindak lanjut, di daerah membentuk Lembaga perlindungan anak (LPA) dengan Keputusan RI No. 81 / HUK / 1997 tanggal 5 Desember 1997 tentang lembaga perlindungan anak (LPA) sebagai upaya masyarakat untuk melaksanakan tugas-tugas tertentu dan peran pemerintah untuk berpartisipasi untuk menyelesaikan realisasi hak-hak anak didalam rangka perlindungan anak.

Memberikan perlindungan kepada anak-anak korban kekerasan dalam rumah tangga telah disediakan ruang yang terpisah atau ruangan khusus untuk anak-anak. Hal ini dilakukan agar anak tidak takut bahwa mereka yang memiliki masalah kejiwaan. Mengenai mekanisme pengajuan perlindungan anak memberi kesempatan yang luas kepada anak kekerasan dalam rumah tangga di korban Malang bisa datang ke layanan perlindungan anak atau BAPERMAS (Badan Pemberdayaan Masyarakat), yang semuanya di PPT yang ( pusat pelayanan terpadu) di tingkat daerah bahwa mekanisme pengajuan perlindungan dan membantu anak korban bantuan hukum sebagai kekerasan dalam rumah tangga harus menyertakan surat pengajuan tertulis. Untuk mekanisme pengajuan perlindungan anak yang menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga bisa datang ke P2TP2A Malang.

#### **H). Polres Unit PPA (Pelayanan Perempuan dan Anak)**

Unit PPA merupakan unit yang bertugas membagikan layanan dalam wujud perlindungan wanita serta anak yang jadi korban kejahatan serta



penegakan hukum terhadap pelaku, tercantum korban dari kejahatan perkosaan. Tujuan mendirikan Perlindungan Perempuan dan Anak merupakan buat menciptakan serta mengumpulkan fakta buat memperjelas ataupun dengan kata lain buat membuat jelas tentang kejahatan yang terjalinkan serta buat menciptakan terdakwa. Dalam perihal ini lebih halus menekankan pendekatan buat mempertanyakan korban umumnya wanita serta anak.

Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) yang terdiri dari faktor pimpinan berbentuk kepala unit Perlindungan perempuan dan anak (Kepala Unit PPA) serta faktor Pembantu pimpinan serta Pelaksana berbentuk Perwira Unit Proteksi (Panit lindung) serta petugas menyelidiki (Panit Idik), seluruh anggota merupakan perempuan. Perihal ini sebab banyak perempuan sudah diperkosa begitu malu buat bersaksi kepada kekerasan yang mereka alami. Yang hendak diinformasikan oleh korban sangat pribadi. Tidak hanya itu, wanita Muslim yang tidak mau meninjau ataupun dicari oleh polisi pria, sehingga petugas membagikan ruang perlindungan perempuan dan anak yang terdiri dari perempuan. Unit PPA ialah faktor layanan serta pelaksana staf yang terletak di dasar Dir I/ Kam serta Trannas Bareskrim Polri, Kasat Opsnal Dit Reskrim Um Polda Metro Jaya, Kasat Opsnal Dit Reskrim Polda serta Kasat Reskrim Polres.

Terjadinya Unit PPA diatur secara tegas dalam Peraturan Kapolri Nomor. Pol. 10 Tahun 2007 dengan mengingat ketentuan-ketentuan yang tertuang dalam:

1. Undang- Undang No 8 Tahun 1981 tentang Hukum Kegiatan Pidana.

2. Undang- Undang No 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negeri Republik Indonesia.
3. Undang- Undang No 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.
4. Undang- Undang No 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
5. Undang- Undang No 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.
6. Keputusan Presiden No 70 Tahun 2002 Tentang Organisasi serta Tata Kerja Kepolisian Negeri Republik Indonesia.
7. Keputusan Kapolri Nomor. Pol.: Kep/ 53/ X/ 2002 bertepatan pada 17 Oktober 2002 tentang Organisasi serta Tata Kerja Satuan- Satuan Organisasi pada Tingkatan Markas Besar Kepolisian Negeri Republik Indonesia, beserta perubahannya.
8. Keputusan Kapolri Nomor. Pol.: Kep/ 54/ X/ 2002 bertepatan pada 17 Oktober 2002 tentang Organisasi serta Tata Kerja Satuan- Satuan Organisasi pada Tingkatan Kepolisian Negeri Republik Indonesia Wilayah( Polda), beserta perubahannya.

Lingkup tugas Unit Perlindungan Perempuan serta Anak( Unit PPA) meliputi tindak pidana terhadap Perempuan serta anak, ialah:

1. Perdagangan orang( human trafficking)
2. Penyelundupan manusia( people smuggling)
3. Kekerasan( secara universal ataupun dalam rumah tangga)
4. Susila( perkosaan, pelecehan, cabul)
5. Perjudian serta pelacuran( vice)